



Peran Human Initiative Dalam Distribusi Bantuan Kepada Palestina Melalui Program Initiative for Children-Empowerment

Asfira Chisara Hasan¹⁾, Hafid Adim Pradana²⁾, Gonda Yumitro³⁾

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

asfira.hasan10@gmail.com¹⁾

adimhafid@umm.ac.id²⁾

gonda@umm.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Human Initiative dalam distribusi bantuan kemanusiaan kepada Palestina melalui program Initiative for Children dan Initiative for Empowerment. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis peran organisasi non-pemerintah (NGO) Indonesia dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik berkepanjangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi dokumentasi, dan focus group discussion, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi serta implementasi program bantuan kemanusiaan Human Initiative di Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Human Initiative berhasil membangun kemitraan strategis dengan berbagai organisasi lokal dan internasional untuk mendukung distribusi bantuan secara efektif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses, blokade wilayah Gaza, dan kondisi keamanan yang tidak stabil, Human Initiative mampu mengembangkan strategi adaptif guna menjaga keberlanjutan program bantuan. Penelitian ini menemukan bahwa peran Human Initiative tidak hanya sebagai penyalur bantuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai mitra dan katalisator yang berkontribusi dalam pembangunan sistem dukungan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Palestina. Temuan ini memperkaya kajian mengenai peran NGO dalam diplomasi kemanusiaan dan distribusi bantuan di wilayah konflik.

Kata kunci: Human Initiative, Bantuan Kemanusiaan, Palestina, Initiative for Children, Initiative for Empowerment

Abstract

This study examines the role of Human Initiative in distributing humanitarian aid to Palestine through the Initiative for Children and Initiative for Empowerment programs. The study is motivated by the limited research examining the role of Indonesian non-governmental organizations (NGOs) in delivering humanitarian assistance within protracted conflict settings. Using a qualitative approach involving document analysis, group discussions, and observation, this research aims to analyze the strategies and implementation of Human Initiative's humanitarian programs in Palestine. The findings reveal that Human Initiative has successfully established strategic partnerships with local and international organizations to facilitate effective aid distribution. Despite facing challenges such as restricted access, the Gaza blockade, and unstable security conditions, the organization has developed adaptive strategies to ensure program sustainability. The study further demonstrates that Human Initiative functions not only as an aid distributor but also as a partner and catalyst in building sustainable social support systems for Palestinian communities. This study contributes to the literature by extending the understanding of NGO roles in humanitarian diplomacy and aid distribution within conflict-affected regions.

Keywords: Human Initiative, Humanitarian Aid, Palestine, Initiative for Children, Initiative for Empowerment.

PENDAHULUAN

Peperangan merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terburuk yang terus menerus terjadi di berbagai belahan dunia. Dampak peperangan tidak hanya dirasakan secara langsung oleh mereka yang terlibat dalam pertempuran, melainkan menyebar pada seluruh struktur masyarakat. Kondisi negara-negara yang masih mengalami konflik berkepanjangan ini mengakibatkan mereka mendapatkan dampak yang sangat buruk bagi negara mereka sendiri, menghasilkan kerusakan infrastruktur, ribuan korban jiwa yang berjatuhan, hingga memicu krisis global yang mempengaruhi ekonomi dan keamanan internasional. Segala infrastruktur yang hancur ini menciptakan kelumpuhan dan ketidakberdayaan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat, baik oleh masyarakat ataupun pemerintah (Weinthal & Sowers, 2019).

Konflik yang terus terjadi hingga menjadi konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya merenggut nyawa jutaan manusia, tetapi juga menghancurkan infrastruktur, memutus akses pendidikan, kesehatan, dan menciptakan krisis manusia berkepanjangan. Akar permasalahan peperangan seringkali kompleks. Beberapa konflik bermula dari berbagai faktor seperti perebutan sumber daya alam dan konflik etnis yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, konflik kepentingan politik antara Rusia dan Ukraina, serta konflik perebutan wilayah antara Palestina dan Israel.

Salah satu konflik yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai penjuru dunia yaitu konflik Palestina-Israel. Warga dunia yang dikejutkan oleh konflik antara kedua negara yang kembali memanas pada tanggal 7 Oktober 2023 ini berawal dari serangan roket oleh Hamas ke wilayah Israel sebagai respons atas penindasan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza yang sudah sejak lama terjadi. Hal ini membuat Israel akhirnya menyerang balik wilayah Gaza dengan membombardir hingga menewaskan lebih dari 8 ribu orang sejak konflik antar kedua negara ini dimulai. Peristiwa ini termasuk dalam kejahatan perang dikarenakan Israel yang menyerang rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian. Hal ini juga telah melanggar perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara-negara.

Konflik yang menarik perhatian dan dukungan bagi kedua belah pihak ini masing-masing mendapatkan dukungannya dari seluruh dunia. Di Indonesia, konflik Palestina-Israel termasuk konflik yang sensitif karena Indonesia sendiri merupakan negara yang menentang adanya kolonialisme. Indonesia menolak Israel karena dianggap sebagai negara zionis yang dibentuk atas penjajahan atau kolonialisme, dan hal ini bertentangan dengan alinea pertama Pembukaan UUD 1945 mengenai pentingnya kemerdekaan dan berseru untuk dihapuskannya penjajahan di dunia, penolakan ini dilakukan dengan alasan norma yang berlaku oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara nyata atas keberadaan Israel sejak awal (Hayat, 2022).

Keterlibatan organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai aktor non-negara dalam penanganan krisis kemanusiaan telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian Hubungan Internasional. Penelitian (Alkindy, 2021).menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka berperan dalam membantu krisis kemanusiaan Rohingya melalui jaringan internasional dan program Messenger of Peace. Sementara itu, penelitian (Khatima, 2022) menyoroti peran Save the Children dalam menangani permasalahan kesehatan mental anak-anak di Palestina. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada bentuk bantuan tertentu atau pada satu fungsi organisasi kemanusiaan saja.

Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana NGO Indonesia menjalankan berbagai peran strategisnya secara simultan dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik berkepanjangan seperti Palestina. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis peran NGO menggunakan kerangka David Lewis yang mencakup fungsi sebagai implementer, catalyst, dan partner. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana Human Initiative menjalankan ketiga peran tersebut melalui program Initiative for Children dan Initiative for Empowerment dalam mendukung masyarakat Palestina.

Penelitian ini menggunakan konsep peran NGO yang dikembangkan oleh David Lewis sebagai landasan analisis. Lewis menjelaskan bahwa NGO menjalankan tiga fungsi utama, yaitu sebagai implementer yang berperan dalam penyediaan bantuan dan layanan, sebagai catalyst

yang mendorong perubahan sosial melalui advokasi dan pemberdayaan, serta sebagai partner yang membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ketiga fungsi tersebut menjadi kerangka yang digunakan untuk memahami strategi Human Initiative dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan dan membangun dukungan berkelanjutan bagi masyarakat Palestina.

Program *Initiative For Children* merupakan kumpulan dari berbagai program yang memiliki fokus di peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak yatim dan duafa. Program-program ini meliputi program beasiswa pendidikan, penyediaan perlengkapan sekolah, perlengkapan ibadah, dukungan psikologis, serta berbagai pelatihan yang menunjang mereka untuk dapat hidup mandiri. Program *Initiative For Children* memiliki program turunan yang melibatkan banyak pihak untuk memberikan manfaat dan memastikan bahwa hak-hak anak dijamin. Beberapa program turunannya yaitu HOME (*Hug, Opportunity, Mentality, Education*) *Children Center*, OTA (Orang Tua Asuh), Pondok Yatim, Bantuan Sarana dan Peralatan Pendidikan, serta Beasiswa Pendidikan telah menjadi instrumen dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan mendukung perkembangan holistik anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan kesejahteraan kolektif yang terletak pada kekuatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama. Program *Initiative for Empowerment* mengutamakan beragam sektor penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti sektor ekonomi, gizi, lingkungan, sanitasi, air dan kebersihan, serta perhatian khusus terhadap kaum disabilitas. Dalam upaya membangun sumber daya manusia dan sistem untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, Human Initiative melakukan sejumlah program turunan dari Program *Initiative for Empowerment* yaitu Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM), Bangun Industri Desa (BID), Pemberdayaan di Sektor Gizi seperti Kebun Gizi dan Sahabat Gizi Kita (SAGITA), pemberdayaan di sektor *Water, Sanitation, Hygiene* dengan program berbagi Air dan Kampung Sanitasi, serta Program *Qurban* dan Ramadan (Human Initiative, 2023).

Tidak hanya bergerak sendiri, pemerintah negara juga turut membantu dalam pelaksanaan tugas untuk membantu masyarakat di Palestina. Dalam hal ini tidak hanya satu lembaga khusus di pemerintahan Indonesia yang memiliki tugas spesifik dalam membantu masyarakat Palestina. Human Initiative telah banyak melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga-lembaga yang bekerja sama ini juga memiliki tugas masing-masing, Kemenlu memiliki tugas memberikan dukungan diplomatik dan memfasilitasi koordinasi bantuan kemanusiaan, Kemensos memiliki tugas membantu dalam distribusi bantuan sosial dan mendukung program-program bantuan kemanusiaan, dan BNPB memiliki tugas untuk membantu dalam koordinasi bantuan darat dan mendukung pengiriman logistik.

Setiap peperangan yang terjadi memberi dampak yang buruk bagi semua masyarakat yang sedang dalam masa konflik, terutama bagi anak-anak. Konflik yang terjadi di Palestina mengacaukan semua aspek, termasuk pendidikan bagi anak-anak Palestina. Pendidikan sendiri menjadi hal penting terutama untuk penerus bangsa suatu negeri. Palestina adalah negara yang kaya, makmur, dan sejahtera. Namun, hal ini berubah setelah negeri ini didatangi oleh Israel dan mengambil paksa hak-hak yang dimiliki masyarakat Palestina (Rifki Eliandy et al., 2023).

Konflik antar negara Palestina-Israel ini terus menerus menarik perhatian masyarakat dunia, sehingga simpati yang muncul untuk membantu masyarakat Palestina menjadi rasa tanggung jawab bagi mereka. Maka dari itu, dengan inisiasi kerja sama oleh berbagai lembaga, organisasi, perkumpulan masyarakat, hingga individu diharapkan dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara kita di Palestina. Bantuan ini tidak hanya sekedar kebutuhan dasar, tetapi juga memulihkan harapan. Dunia membutuhkan pendekatan secara luas yang tidak hanya menghentikan konflik tersebut, tetapi juga membangun kembali masa depan generasi yang hilang.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan konsep peran *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang dikembangkan oleh David Lewis. Lewis melihat NGO sebagai aktor yang membangun ruang yang tidak terjangkau oleh negara maupun komersial. NGO dalam studi

Hubungan Internasional dipandang sebagai aktor non-negara yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam melintasi batas kedaulatan untuk tujuan kemanusiaan. Fokus utama dari pemikiran Lewis adalah bagaimana NGO mengubah sumber daya dan menggunakan wewenang mereka yang telah diberikan menjadi tindakan nyata yang berdampak di wilayah konflik melalui fungsi-fungsi strategis yang dapat diukur (Lewis et al., 2021a).

Dalam bukunya yang berjudul *Non-Governmental Organizations and Development* edisi kedua yang di rilis tahun 2021, Lewis mengatakan bahwa banyak buku mengenai NGO yang menjelaskan kerangka kerja yang rumit pada bab-bab awalnya, ia mengatakan bahwa NGO dapat diringkas dalam tiga peran utama yang terkait, yaitu sebagai pelaksana (*implementers*), katalisator (*catalysts*), dan mitra (*partners*). Sebagai pelaksana (*implementers*), NGO berperang dalam mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa seperti layanan kesehatan, keuangan mikro, dan bantuan darurat. Ini biasanya dilakukan melalui perjanjian dengan pemerintah atau lembaga yang memberikan dukungan finansial atau sumber daya kepada NGO untuk menjalankan program-program tertentu, atau disebut sebagai donor. Selain itu, NGO yang menjalankan peran sebagai katalisator (*catalysts*) yang didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menginspirasi, memfasilitasi, atau menyumbangi ide dan tindakan untuk mendorong perubahan sosial. Ini termasuk mengembangkan solusi baru, menggerakkan masyarakat di tingkat bawah agar mampu menyuarakan kepentingan mereka, mendorong, dan berusaha memengaruhi proses kebijakan melalui *policy entrepreneurship*. Terakhir, NGO bekerja sebagai mitra (*partners*) dengan pihak lain seperti pemerintah, sektor swasta, dan donor untuk berbagi risiko atau keuntungan dalam aktivitas bersama, seperti membangun kapasitas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Meskipun dipisahkan secara konseptual, sebagian besar NGO tetap menjalankan kombinasi ketiga peran tersebut secara aktif sesuai dengan perubahan konteks dan peluang yang ada.

Kesamaan antara kedua skripsi dengan penulisan ini yaitu memiliki fokus yang sama terhadap peran organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Kedua skripsi ini juga menggunakan konsep yang sama yaitu Konsep Peran NGO. Konsep peran NGO yang digunakan adalah konsep menurut David Lewis dan Nazneen Kanji. Penulis menggunakan konsep tersebut karena dalam penelitian yang di lakukan, konsep ini menjelaskan peranan Human Initiative sebagai NGO yang juga melakukan perannya untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan akan membantu penulis untuk menjelaskan serta menganalisis variabel dari Human Initiative sebagai organisasi non-pemerintah yang melintasi batas negara atau dapat disebut NGO.

Tantangan dan keefektifan peran dari Human Initiative untuk memaksimalkan bantuan manusia yang akan diberikan kepada masyarakat Palestina terutama anak-anak di Palestina yang tentu dibantu oleh aktor-aktor masyarakat dan individu melalui program *Initiative For Children* dan *Initiative for Empowerment*. Perlu diingat bahwa Human Initiative merupakan lembaga kemanusiaan yang tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik, melainkan fokus kepada pemberian bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, pendampingan, dan advokasi sosial. Pada satu sisi, situasi konflik berkepanjangan di Palestina menyulitkan proses distribusi bantuan, sehingga Human Initiative perlu melakukan beberapa strategi yang sesuai dengan kapasitasnya untuk memaksimalkan upaya kemanusiaan. Maka dari itu, berdasarkan pokok masalah tersebut, penelitian ini mengajukan sebuah rumusan masalah bagaimana peran Human Initiative dalam mendistribusikan bantuan kepada Palestina melalui program *Initiative For Children* dan *Initiative for Empowerment*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendalam. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang lain dan pelaku yang diamati (Alkindy, 2021). Menurut Maleong, metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena secara

mendalam dengan memprioritaskan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dikarenakan tema yang diteliti merupakan tema yang kompleks dan menggunakan model penelitian analisis dari fenomena yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi serta diinisiasi (S. Nanda, 2026).

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, diskusi kelompok (focus group discussion), dan observasi. Diskusi kelompok dilakukan pada bulan Januari–Februari 2025 dengan melibatkan lima informan yang terdiri atas satu mentor program dan empat staf Human Initiative yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program Initiative for Children dan Initiative for Empowerment. Diskusi dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai strategi distribusi bantuan, mekanisme koordinasi dengan mitra lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program di Palestina.

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan tahunan Human Initiative periode 2019–2023, dokumen program, publikasi resmi organisasi, data penerima manfaat, serta berbagai sumber pendukung yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memverifikasi dan memperkuat hasil temuan dari diskusi kelompok dan observasi.

Observasi dilakukan selama proses pertemuan dan koordinasi antara Human Initiative dengan organisasi atau komunitas kemanusiaan yang memiliki tujuan serupa dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Observasi dilakukan secara non-partisipatif selama kurang lebih dua bulan untuk memahami pola koordinasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan strategi kolaborasi yang diterapkan dalam pelaksanaan program bantuan kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Kemanusiaan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Palestina

Palestina saat ini berada pada situasi darurat kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan sehingga hal tersebut membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh pihak untuk mencegah semakin memburuknya kondisi masyarakat yang terdampak dalam situasi perang. Ditambah dengan semakin kompleksnya konflik geopolitik yang mengakibatkan sulitnya akses bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah terdampak, sehingga menjadi tantangan besar bagi seluruh masyarakat internasional terutama organisasi internasional kemanusiaan untuk memperhatikan berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari aspek keamanan, logistik, diplomasi, hingga koordinasi bantuan lintas negara. Kondisi-kondisi ini juga semakin diperparah dengan runtuhnya infrastruktur masyarakat yang terdampak konflik seperti rumah sakit, pusat ekonomi, dan fasilitas publik yang membuat masyarakat di Palestina kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar mereka seperti kesehatan, mata pencaharian, dan kebutuhan hidup sehari-hari (Hamamra et al., 2025).

Mulai dari pengungsian hingga perkotaan, serta masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah maupun tinggi, konflik di Palestina telah menyebar dan memengaruhi seluruh bagian masyarakat. Dampak konflik yang dialami rakyat Palestina memiliki mencakup berbagai aspek yang beragam dan kompleks, mulai dari kehancuran infrastruktur sampai trauma psikologis yang didapatkan oleh masyarakat Palestina, sehingga tidak mengherankan bahwa krisis kemanusiaan ini dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Palestina (Dardona et al., 2025). Keadaan darurat yang mengakibatkan gangguan pada trauma psikologis, sosial, dan kondisi emosional pada anak memberikan dampak semakin buruk. Pada tahun 2017, PBB menyatakan bahwa sekitar 290.000 anak, atau 25% anak-anak yang berada di Gaza,, sangat membutuhkan bantuan psikososial (Khatima, 2022).

Beberapa faktor yang menyebabkan status darurat kemanusiaan di Palestina seperti meningkatnya ketegangan dengan Israel dan berkembangnya konflik yang semakin serius. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan di wilayah yang menghambat akses bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak konflik. Selain itu, sebagian besar masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah konflik tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang membuat mereka harus bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit (Farhat et al., 2023a).

Konflik antara kedua negara ini menggambarkan kondisi dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks di Timur Tengah. Dampak kemanusiaan menjadi salah satu aspek yang sangat terasa, dengan serangan udara, blokade, dan pertempuran darat yang menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuh, pengungsi, dan kehancuran infrastruktur. Kondisi ekonomi yang semakin melemah di wilayah tersebut, wilayah yang terdampak mengalami kerugian besar terutama pada sektor-sektor khusus seperti pertanian, industri, dan perdagangan. Meskipun negosiasi dan perjanjian diperlukan dalam upaya perdamaian, ketidaksepakatan dasar dan pelanggaran perjanjian seringkali menjadi penghalang utama. Selain itu, peran pihak ketiga, baik negara maupun organisasi internasional, telah digunakan sebagai upaya mediasi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan besar lainnya (Febi et al., 2024).

Masyarakat terutama anak-anak di wilayah Palestina hidup dalam lingkungan yang dekat dengan kekerasan, ketidakamanan, dan kemiskinan. Walaupun terdapat kemajuan dalam menyuarkan hak-hak di wilayah konflik Palestina, namun sebagian besar masyarakat masih harus merasakan penderitaan akibat dari dampak konflik yang terus terjadi. Di Gaza, serangan militer menyebabkan dampak yang cukup buruk dalam jangka panjang dan ditambah dengan blokade yang berlangsung secara terus-menerus yang menyebabkan masyarakat terutama anak-anak yang terekspos pada tindakan kekerasan dan perampasan setiap hari dan berpengaruh buruk terhadap aktivitas mereka di daerah tersebut (Khatima, 2022).

Dari dampak-dampak tersebut membuat situasi kemanusiaan di Palestina sangat memprihatinkan dengan kebutuhan bantuan yang mendesak di berbagai sektor. Masyarakat menghadapi krisis akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung yang aman akibat konflik berkelanjutan dan blokade. Rumah sakit yang beroperasi dalam kondisi kritis dengan keterbatasan listrik, peralatan medis, dan tenaga kesehatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah Palestina semakin parah. Di Gaza, dengan 2 juta lebih warga Palestina kini berisiko akibat terganggunya pengiriman bantuan utama yang sangat diperlukan di tengah pengepungan dan agresi Israel yang masih berlangsung (Sari & Kurmala, 2024).

Berdasarkan data yang dihimpun dari BBC NEWS Indonesia, kondisi kemanusiaan di Palestina, khususnya di wilayah Gaza, menunjukkan kerentanan yang mendalam di berbagai sektor. Dampak dari blokade dan konflik yang berkepanjangan telah menciptakan hambatan terhadap pemenuhan hak dasar warga sipil sebagaimana dirinci dalam tabel berikut (BBC NEWS INDONESIA, 2021):

Tabel 1. Dampak dari blokade dan konflik

Kategori Kebutuhan	Kondisi dan Data	Dampak Konflik
Layanan Kesehatan	Sistem kesehatan publik berada dalam kondisi genting.	Akses pengobatan terhambat birokrasi sehingga pasien memerlukan izin ganda dari Otoritas Palestina (PA) dan pemerintah Israel untuk keluar wilayah.
Ketahanan Pangan	Lebih dari 1 juta penduduk Gaza rawan pangan tingkat sedang hingga parah.	Pengiriman bantuan melalui konvoi makanan sering terganggu akibat serangan yang terus berlanjut di perbatasan.
Air Bersih	Konsumsi air rata-rata hanya 88 liter/kepala (di bawah standar WHO: 100 liter)	Air keran terkontaminasi (asin dan tercemar) sehingga tidak layak minum akibat rusaknya infrastruktur air.
Pendidikan dan Hunian	Sekolah yang dikelola PBB beralih fungsi menjadi pusat pengungsian.	Serangan militer memaksa warga sipil melarikan diri dari rumah mereka dan menjadikan sekolah sebagai satu-satunya tempat berlindung
Sosio-Ekonomi	65% populasi merupakan kaum muda di bawah usia 25 tahun (CIA Factbook).	Tingginya angka pengangguran kaum muda akibat keterbatasan akses ekonomi dan isolasi wilayah.

Kompleksitas krisis yang diuraikan di atas tidak hanya membentuk kondisi penderitaan masyarakat Palestina, tetapi juga secara langsung menciptakan hambatan struktural bagi upaya distribusi bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Human Initiative. Tiga hambatan utama yang paling dominan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Meskipun implementasi program-program Human Initiative di Palestina telah diuraikan secara informatif, penting untuk menelaah secara lebih mendalam hambatan-hambatan yang secara nyata dihadapi di lapangan. Hambatan pertama dan paling fundamental adalah blokade fisik yang diberlakukan di perbatasan Gaza. Sejak blokade Israel atas Gaza yang diperketat pada tahun 2007, seluruh arus barang termasuk bantuan kemanusiaan tunduk pada sistem pemeriksaan berlapis yang dikendalikan oleh otoritas Israel melalui pintu masuk utama seperti Kerem Shalom. Kondisi ini menyebabkan bantuan yang masuk tertahan selama sehari-hari hingga berminggu-minggu hanya untuk mendapatkan izin lintas perbatasan, sehingga bantuan yang bersifat darurat seperti obat-obatan, vaksin, dan bahan pangan berisiko rusak atau kadaluarsa sebelum sampai ke tangan penerima manfaat. Human Initiative sebagai organisasi yang mengandalkan jalur perbatasan Rafah dan koordinasi dengan UNRWA tidak luput dari hambatan struktural ini, di mana setiap pengiriman logistik harus melalui proses negosiasi dan verifikasi administratif yang panjang sebelum dapat memasuki wilayah Gaza (Farhat et al., 2023b).

Hambatan kedua adalah pemecahan wilayah operasional. Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur memiliki rezim kontrol yang berbeda secara politik maupun administratif, sehingga sistem perizinan distribusi bantuan di satu wilayah tidak langsung berlaku di wilayah lain. Dalam konteks program OTA Human Initiative yang menjangkau lebih dari 500 anak di tiga wilayah tersebut, tahapan ini secara praktis berarti bahwa mitra lokal yang berbeda harus diaktifkan di setiap wilayah, dengan prosedur koordinasi yang terpisah dan biaya operasional yang berlipat ganda. Di Gaza khususnya, kondisi diperparah oleh kerusakan infrastruktur jalan dan komunikasi akibat serangan militer, yang membuat pemetaan jalur distribusi internal harus diperbarui secara berkala. Hambatan ketiga adalah keterbatasan akses perbankan dan transfer keuangan internasional. Sanksi finansial dan pembatasan sistem perbankan di Gaza menyebabkan transfer dana dari lembaga donor internasional ke mitra lokal kerap terhambat, sehingga ketersediaan anggaran operasional di lapangan sering tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak yang dihadapi penerima manfaat (Amin et al., 2025).

Strategi Distribusi Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Palestina

Palestina merupakan wilayah yang menjadi fokus perhatian bagi organisasi kemanusiaan internasional, karena kompleksnya situasi konflik dan sulitnya akses bantuan ke wilayah tersebut. Sedangkan, hukum humaniter internasional telah mengatur perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik, karena hal tersebut merupakan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh banyak negara (A. R. Nanda & Mahwati, 2022). Organisasi kemanusiaan internasional sebagai aktor non-negara juga bertugas untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, tetapi di satu sisi prosedur dan alur distribusi bantuan masih menghadapi banyak hambatan ditambah juga perlunya dukungan yang lebih besar dari komunitas internasional sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan global.

Segala hambatan yang didapatkan oleh berbagai organisasi kemanusiaan internasional ini menjadikan mereka harus melakukan intervensi kemanusiaan untuk memberikan bantuannya kepada korban konflik di Palestina. Sejumlah literatur cenderung mengartikan kata intervensi sebagai tindakan kekerasan yang menggunakan instrumen *force* (kekerasan), yaitu militer. Akan tetapi dalam konteks ini, intervensi yang dimaksud yaitu turut serta dalam urusan negara lain, namun melalui cara *soft power*, yakni dengan memberi berbagai bantuan kemanusiaan seperti bantuan logistik, pelayanan kesehatan, dan konseling psikologis kepada korban konflik.

Di kutip dari buku *Black's Law Dictionary* milik Bryan A. Garner edisi ke-7, dalam menurut Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB, intervensi kemanusiaan adalah intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional, baik oleh aktor negara ataupun aktor non-negara, untuk mengurangi

pelanggaran HAM atau penindasan kepada martabat manusia dalam suatu negara, meskipun tindakan tersebut dapat melanggar kedaulatan negara tersebut. Dan dari buku Internasional *Politics: a framework for analysis* edisi ke-4 milik Holsti K.J., intervensi kemanusiaan umumnya dilakukan melalui aksi militer atau menggunakan suatu pasukan keamanan yang berada di bawah komando PBB. Tetapi, saat ini terdapat pula intervensi kemanusiaan yang lebih halus, yaitu dengan menggunakan isu pelanggaran HAM dan bantuan ekonomi sehingga seolah-olah PBB ataupun komunitas internasional yang ada di bawah naungan kemanusiaan mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

Adapun aktivitas intervensi kemanusiaan meliputi: a) bantuan logistik dan jaminan keamanan bagi pertukaran atau pemindahan pengungsi atau pelarian serta tugas-tugas yang memiliki hubungan dengan kemanusiaan; b) Bantuan teknis, pelatihan, dan keuangan bagi pembersihan ranjau; c) Bantuan logistik, keuangan, dan teknis untuk peletakan senjata, pembebasan, dan penyatuan kembali tentara setelah berakhirnya perang, termasuk pelatihan angkatan bersenjata yang telah dipersatukan setelah berakhirnya pertikaian; dan d) Bantuan teknis dan keamanan bagi organisasi serta memantau dan memverifikasi hasil pemilihan umum (Fathun, 2017).

Dalam melaksanakan kegiatan distribusi bantuan kemanusiaan di zona konflik, banyak tantangan kompleks yang membutuhkan strategi dan pendekatan. Keamanan merupakan kendala utama karena aktivitas militer yang selalu aktif, adanya ranjau darat, dan serangan terhadap konvoi bantuan yang seri mengganggu jalan distribusi. Di wilayah Gaza, akses terbatas dan blokade menciptakan berbagai jalur yang sulit untuk di jangkau agar dapat sampai kepada para korban konflik, sementara negosiasi dengan berbagai pihak yang berkonflik memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi kemanusiaan menerapkan berbagai strategi seperti penggunaan koridor kemanusiaan, kemitraan dengan komunitas lokal, dan implementasi sistem peringatan dini. Penggunaan teknologi seperti pemetaan digital dan analisis data *real-time* juga membantu untuk mengoptimalkan rute distribusi dan mengidentifikasi celah dalam rantai pasokan bantuan.

Human Initiative sebagai salah satu organisasi kemanusiaan telah membangun jaringan kemitraan strategis dalam upaya distribusi bantuan kemanusiaan di Palestina, khususnya melalui kolaborasi dengan organisasi lokal seperti Palestinian Medical Relief Society (PMRS) dan Palestine Red Crescent Society (PRCS). Kerja sama ini masih menghadapi banyak hambatan mengingat situasi di wilayah konflik yang sulit dilewati, akses ke wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan menjadi tantangan utama. Para mitra lokal yang berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat, memfasilitasi perizinan otoritas setempat, dan memastikan bantuan dapat tersalurkan secara efektif meski dalam situasi konflik yang terus berlangsung.

Pada tingkat nasional, Human Initiative menjalin koordinasi aktif dengan lembaga-lembaga seperti United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) for Palestine Refugees in the Near East dan Islamic Relief Worldwide untuk memperkuat distribusi bantuan ke Palestina. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek seperti pengadaan logistik, pembukaan jalur bantuan alternatif melalui perbatasan Rafah, serta pengembangan sistem distribusi yang dapat beradaptasi dengan konflik yang sedang berlangsung. Strategi yang diterapkan meliputi pembentukan hub logistik di negara-negara tetangga, penggunaan sistem *tracking* bantuan digital, dan pengembangan mekanisme respons cepat untuk menghadapi situasi darurat. Pendekatan terpadu ini memungkinkan Human Initiative untuk mempertahankan aliran bantuan yang berkelanjutan meski menghadapi berbagai hambatan operasional di wilayah konflik (Migdad et al., 2025).

Strategi-strategi yang telah dijabarkan di atas perlu dievaluasi secara kritis untuk menilai efektivitas aktualnya di lapangan. Analisis berikut menelaah tiga strategi adaptif utama Human Initiative berdasarkan kendala operasional yang dihadapi secara nyata.

Peran Human Initiative dalam Mendistribusikan Bantuan ke Palestina

Untuk menganalisis peran Human Initiative secara lebih tajam dan sistematis, sub bab ini

menggunakan kerangka tiga fungsi NGO yang dikemukakan oleh David Lewis (2001). Lewis mengategorikan peran NGO ke dalam tiga fungsi utama: pertama, *implementer*, yakni NGO yang secara langsung melaksanakan program dan mendistribusikan bantuan kepada penerima manfaat; kedua, *catalyst*, yakni NGO yang mendorong, menginspirasi, atau memfasilitasi perubahan pada tingkat individu, komunitas, maupun kebijakan; dan ketiga, *partner*, yakni NGO yang membangun dan memelihara kemitraan strategis dengan berbagai aktor untuk memperluas dampak intervensi kemanusiaan (Lewis, 2001). Kerangka ini relevan untuk diterapkan pada Human Initiative karena organisasi ini secara empiris menjalankan ketiga fungsi tersebut secara simultan, meski dengan intensitas yang berbeda pada setiap program. Selain sebagai perbandingan, organisasi seperti Save the Children memfokuskan peran mereka pada penanganan kesehatan mental anak-anak yang terganggu akibat konflik berkepanjangan (Khatima, 2022). Sementara itu, Human Initiative melalui program-program yang dimiliki menjalankan peran strategis dalam mendistribusikan bantuannya yang secara tidak langsung juga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih stabil bagi masyarakat yang terdampak. Penggabungan antara bantuan fisik yang dilakukan Human Initiative dan bantuan psikososial yang dilakukan oleh INGO lain menunjukkan adanya ekosistem bantuan kemanusiaan yang saling melengkapi dalam merespons krisis di Palestina.

1. Human Initiative sebagai *Implementer*

Dalam fungsinya sebagai *implementer*, Human Initiative mengimplementasikan Program *Initiative for Children* dan *Initiative for Empowerment* sebagai bagian dari strategi bantuan kemanusiaan langsung di Palestina. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya fokus pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga membangun sistem dukungan berkelanjutan untuk anak-anak yang terdampak konflik. Berbagai bentuk bantuan telah disalurkan mulai dari paket nutrisi, layanan kesehatan darurat, dukungan psikososial, hingga program pendidikan darurat yang disesuaikan dengan kondisi konflik. Human Initiative juga membangun sistem *monitoring* dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan situasi di wilayah konflik.

Tahun 2019 merupakan tahun terwujudnya *humanity collaboration* bagi Human Initiative. Bersama Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan Nurul Hayat, Human Initiative bekerja sama membangun sekolah di Tepi Barat Palestina. Salah satu kegiatan dari kerja sama ini yaitu pada Juni 2019 diadakan Konser Amal Palestina Bertajuk "*Voice of Children*" di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Sinergi ini merupakan semangat kemanusiaan untuk membangun Palestina yang lebih baik melalui program pendidikan yaitu Sekolah Indonesia untuk Palestina (Human Initiative, 2019).

Program pembangunan Sekolah Indonesia untuk Palestina merupakan perwujudan dari semangat kerja sama antar lembaga kemanusiaan dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak Palestina. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga mencakup pelatihan tenaga pengajar, dan penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran. Melalui penyatuan kerja sama, program ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif di tengah situasi konflik yang berlangsung. Keberhasilan program juga dapat menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga kemanusiaan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam membantu masyarakat di wilayah konflik.

Pada tahun 2020, Human Initiative dengan Program Bukber "Bulan Kita Bersama" yang merupakan sub program dari *Initiative for Empowerment* merespon keterbatasan sosial selama bulan Ramadhan. Program Bukber bertujuan untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi melalui rangkaian kegiatan berbagi buka puasa berbagi paket bahan makanan, dan berbagi sedekah. Semua pelaksanaan kegiatan tetap memenuhi Protokol Kesehatan (Prokes) yang berlaku, seperti tidak menimbulkan kerumunan, kewajiban menggunakan masker, menggunakan alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Para penerima manfaat ini tersebar di Indonesia terdapat 2.949 paket program Bukber. Sedangkan penyaluran di luar negeri, Human Initiative berkonsentrasi pada empat negara yaitu Palestina, Suriah, Somalia, dan Myanmar (Human Initiative, 2020).

Program Bukber menunjukkan cara Human Initiative dalam menyalurkan bantuan di tengah pandemi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan. Di keempat negara internasional, program ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal masing-masing negara. Di Palestina, bantuan difokuskan pada keluarga yang tinggal di pengungsian dan area terdampak konflik. Melalui jaringan mitra lokal di masing-masing negara, Human Initiative telah mendistribusikan paket bantuan kepada para penerima manfaat di empat negara tersebut yang salah satunya merupakan Palestina dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap proses distribusi.

2. Human Initiative sebagai *Catalyst*

Dalam fungsinya sebagai *catalyst*, Human Initiative tidak sekadar menyalurkan bantuan, melainkan juga berperan mendorong perubahan jangka panjang di tingkat komunitas. Peran ini paling kentara pada Program Orang Tua Asuh (OTA) yang secara sistematis membangun lingkungan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Melalui mekanisme yang menghubungkan donatur dengan anak asuh secara personal, program ini mengkatalisasi tumbuhnya kesadaran solidaritas internasional sekaligus mendorong kemandirian komunitas lokal Palestina melalui dukungan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat.

Pada 2022, Program Orang Tua Asuh (OTA) di bawah program *Initiative for Children* merupakan sebuah perjuangan kepedulian sosial yang membawa makna mendalam bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa yang kurang mampu melalui pola pengasuhan. Melalui program OTA, Human Initiative memberikan bantuan berupa biaya pendidikan, bantuan pangan, serta bantuan kesehatan dengan melibatkan orang tua asuh dan anak asuh untuk menjadi keluarga dan lingkungan yang saling mendukung serta peduli satu sama lain. Bantuan dan manfaat yang diberikan oleh Human Initiative melalui program OTA tahun 2022 total penerima manfaat sebanyak 2.013 dengan 387 titik lokasi, 11 Provinsi di Indonesia, dan di Palestina (Human Initiative, 2022).

Di Palestina sendiri, program OTA telah menjangkau lebih dari 500 anak yang tersebar di berbagai wilayah seperti Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Pendistribusian bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan mitra lokal yang telah terverifikasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Program ini tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga memberikan pendampingan psikososial mengingat kondisi trauma yang dialami anak-anak di wilayah konflik. Selain itu, Human Initiative juga mengembangkan sistem *monitoring* dan evaluasi yang komprehensif untuk memantau perkembangan anak asuh, termasuk prestasi akademik, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis mereka. Melalui pendekatan holistik ini, program OTA berupaya memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi anak-anak penerima manfaat, sekaligus membangun kesadaran global tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan lintas negara.

3. Human Initiative sebagai *Partner*

Dalam fungsinya sebagai *partner*, Human Initiative secara konsisten membangun dan memelihara jaringan kemitraan multi-lapis yang menjadi tulang punggung efektivitas program di wilayah konflik. Kemitraan ini mencakup tiga level: kemitraan horizontal antar-NGO domestik (Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Nurul Hayat), kemitraan vertikal dengan organisasi internasional (UNRWA, Islamic Relief Worldwide), dan kemitraan operasional dengan aktor lokal di Palestina (PMRS, PRCS). Ketiga lapis kemitraan ini memungkinkan Human Initiative untuk mengakses sumber daya, jaringan distribusi, dan legitimasi yang tidak dapat dibangun secara mandiri. Program Qurban 2023 yang menjangkau tujuh negara sekaligus merupakan bukti konkret dari kapasitas *partnership* lintas negara yang hanya dimungkinkan melalui jaringan mitra yang telah dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun (Lewis et al., 2021b).

Tahun 2023, Program Qurban Human Initiative merupakan sebuah upaya untuk memberikan fasilitas dan bantuan kepada para Calon Pequrban (Mudhohy) dalam melaksanakan ibadah qurban. Melalui program yang berada di bawah *Initiative for Empowerment* ini, Human Initiative bertujuan untuk menjembatani antara para calon pequrban dengan wilayah-wilayah di

Indonesia yang membutuhkan bantuan, terutama di wilayah Indonesia Timur. Fokus utama program ini adalah pada wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggi), Pulau Terluar, dan wilayah lain. Terdapat 217.160 pemegang hak program Qurban, 130 di wilayah Kabupaten/Kota, 22 di Provinsi, dan Luar negeri terdapat 7 negara yaitu Myanmar, Palestina, Turki, Somalia, Uganda, Kenya, Tanzania (Human Initiative, 2023).

Dalam mengimplementasikan program bantuan di Palestina, Human Initiative menerapkan strategi distribusi yang sistematis demi menjamin keamanan dan ketepatan sasaran. Jika berkaca pada pengalaman NGO lain seperti Gerakan Pramuka, keberhasilan mobilisasi bantuan sering kali bergantung pada keanggotaan dalam aliansi strategi untuk memudahkan pengumpulan dan distribusi logistik. Pada kasus krisis Rohingya, kolaborasi tersebut terbukti efektif dalam menyalurkan kebutuhan dasar berupa pangan, obat-obatan, dan pakaian kepada warga terdampak (Alkindy, 2021). Meskipun bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh NGO seringkali belum memberikan hasil signifikan terhadap kesepakatan damai di tingkat politik, upaya ini tetap memiliki potensi besar dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Dengan demikian, program-program yang dijalankan oleh Human Initiative di Palestina tidak hanya berfungsi sebagai bantuan darurat, tetapi juga sebagai instrumen penguat peran aktor non-negara dalam diplomasi kemanusiaan internasional. Secara lebih konkret, dalam menghadapi blokade yang secara langsung menghambat distribusi logistik, Human Initiative menerapkan sejumlah mekanisme adaptif yang dapat dikategorikan sebagai manifestasi dari fungsi partner sekaligus implementer dalam kerangka Lewis.

Dalam menghadapi blokade yang membatasi distribusi logistik secara langsung, Human Initiative menerapkan sejumlah strategi konkret yang dapat diidentifikasi dari pola operasional mereka. Strategi pertama adalah lokalisasi pengadaan bantuan (*local procurement*). Alih-alih mengirimkan seluruh logistik dari Indonesia yang berisiko tertahan di perbatasan, Human Initiative mengalihkan sebagian anggaran program untuk membeli kebutuhan pangan, obat-obatan generik, dan perlengkapan sekolah dari pasar lokal di wilayah Tepi Barat maupun dari pemasok di Mesir dan Yordania yang memiliki akses lebih mudah ke jalur distribusi Gaza. Pendekatan ini secara langsung mengurangi ketergantungan pada jalur impor internasional yang paling rentan terhadap blokade, sekaligus mempercepat waktu respons distribusi secara signifikan. Pada pelaksanaan program OTA tahun 2022 dan program Qurban tahun 2023, mekanisme *local procurement* ini dijalankan melalui mitra lokal yang telah terverifikasi, yakni PMRS dan PRCS, yang memiliki kapasitas jaringan pasokan internal di dalam Gaza sendiri.

Strategi kedua adalah pemanfaatan jalur diplomasi kemanusiaan melalui koalisi NGO. Human Initiative memanfaatkan posisinya sebagai anggota jaringan *humanitarian consortium* yang berkoordinasi dengan UNRWA dan Islamic Relief Worldwide untuk mengakses koridor kemanusiaan yang hanya dapat dibuka melalui negosiasi kolektif. Koridor kemanusiaan dalam konteks konflik Gaza tidak dapat dibuka secara sepihak oleh satu organisasi, melainkan memerlukan akumulasi tekanan diplomatik dari kelompok organisasi internasional kepada otoritas yang mengendalikan perbatasan. Dengan tergabung dalam kerjasama ini, Human Initiative secara efektif meminjam kapasitas diplomatik organisasi yang lebih besar untuk membuka akses yang tidak dapat mereka capai secara mandiri. Strategi ketiga adalah transformasi dana menjadi bantuan berbasis nilai (*cash-based assistance*). Ketika jalur logistik fisik benar-benar tertutup, Human Initiative mengalihkan sebagian modalitas bantuan dari pengiriman barang ke transfer dana langsung kepada keluarga penerima manfaat melalui jaringan mitra lokal. Pendekatan ini sepenuhnya melewati hambatan fisik perbatasan, karena yang ditransfer adalah nilai finansial, bukan barang. Meskipun efektivitas strategi ini terbatas oleh hambatan sistem perbankan yang telah diuraikan sebelumnya, namun dalam situasi blokade total, *cash-based assistance* tetap menjadi alternatif yang lebih responsif dibandingkan menunggu terbukanya perbatasan fisik yang tidak dapat diprediksi waktunya. Keseluruhan strategi konkret ini mencerminkan bahwa Human Initiative beroperasi bukan hanya sebagai lembaga distribusi logistik, melainkan juga sebagai aktor yang secara aktif beradaptasi terhadap arsitektur blokade dengan memanfaatkan celah-celah operasional yang tersedia dalam batasan hukum dan norma kemanusiaan internasional.

4. Efektivitas Strategi Human Initiative

Strategi adaptif yang diterapkan Human Initiative, seperti pembentukan *hub* logistik di negara-negara tetangga, penggunaan sistem *tracking* digital, dan pengembangan mekanisme respons cepat. Strategi ini memiliki relevansi yang signifikan secara konseptual, namun perlu dikaji efektivitasnya secara kritis. Pertama, pembentukan *hub* logistik di negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir memang terbukti efektif dalam memperpendek waktu respons pengiriman, karena memungkinkan Human Initiative menyimpan stok bantuan lebih dekat ke wilayah sasaran tanpa harus menghadapi prosedur bea cukai internasional dari Indonesia secara berulang. Namun demikian, strategi ini menghadapi keterbatasan struktural: keberadaan *hub* di Mesir tidak menjamin kelancaran akses melalui perbatasan Rafah yang statusnya berubah-ubah secara sepihak tergantung pada kondisi politik dan keamanan regional. Ketika Mesir menutup perbatasan Rafah, yang terjadi berulang kali dalam periode 2021-2024 yaitu seluruh stok logistik yang telah disiapkan di *hub* mengalami kemacetan dan tidak dapat didistribusikan, mengakibatkan kerugian logistik yang signifikan dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan darurat di saat yang paling kritis (OCHA, 2025).

Kedua, penggunaan sistem *tracking* bantuan digital menghadapi tantangan praktis di wilayah yang kerap mengalami pemadaman listrik total dan gangguan jaringan telekomunikasi akibat serangan infrastruktur. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan data yang serius antara informasi yang diterima di tingkat pusat organisasi dengan realita distribusi yang terjadi di lapangan, sehingga sistem *monitoring* yang dirancang sebaik apapun tidak akan mampu berfungsi optimal apabila infrastruktur digital di Gaza terus mengalami kerusakan sistemik. Ketiga, mekanisme respons cepat yang dikembangkan Human Initiative pada dasarnya masih bersifat responsif terhadap eskalasi konflik, bukan pencegah. Artinya, kapasitas adaptif organisasi baru teraktivasi penuh ketika krisis sudah mencapai puncaknya, padahal pada saat itulah hambatan akses justru berada di titik tertinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya Human Initiative untuk mengembangkan protokol *pre-positioning* yang lebih sistematis, yakni menempatkan cadangan logistik dalam jumlah yang memadai di lokasi-lokasi strategis sebelum eskalasi konflik terjadi, sebagaimana dipraktikkan oleh organisasi seperti International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam konteks konflik bersenjata (ICRC, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Organisasi Kemanusiaan terutama Human Initiative memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di Palestina, khususnya melalui program utamanya yaitu *Initiative for Children* dan *Initiative for Empowerment*. Dalam pelaksanaannya, Human Initiative menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses dan blokade di wilayah Gaza, sulitnya mendapatkan perizinan, kondisi keamanan yang tidak stabil, serta hambatan dalam koordinasi logistik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Human Initiative mengembangkan berbagai strategi seperti membangun kemitraan dengan organisasi baik lokal maupun internasional untuk membantu berjalannya program kemanusiaan.

Implementasi program bantuan Human Initiative telah menunjukkan hasil yang baik melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan Sekolah Indonesia untuk Palestina pada tahun 2019, Program Bukber “Bulan Kita Bersama” di tahun 2020, Program OTA “Orang Tua Asuh” pada tahun 2022, dan Program Qurban di tahun 2023. Semua program yang dilakukan setiap tahun pun masih berjalan hingga sekarang. Keberhasilan program-program tersebut membuktikan bahwa kolaborasi antar lembaga kemanusiaan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam membantu masyarakat di wilayah konflik.

Kemampuan adaptasi Human Initiative dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah juga terbilang baik, seperti pada pelaksanaan program Bukber selama pandemi yang tetap memperhatikan protokol kesehatan sambil memastikan bantuan tetap tersalurkan dengan efektif. Pendekatan secara menyeluruh yang diterapkan melalui program-programnya menunjukkan bahwa organisasi non-pemerintah ini tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat secara

menyeluruh. Konsistensi bantuan yang terlihat dari laporan tahunan 2019-2023 semakin memperkuat komitmen Human Initiative dalam memberikan bantuan berkelanjutan ke Palestina melalui berbagai program yang terus berkembang dari tahun ke Tahun.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk penelitian lanjutan yang mencakup berbagai aspek krusial dalam konteks bantuan kemanusiaan di Palestina. Penelitian ke depan dapat berfokus pada evaluasi efektivitas jangka panjang program pemberdayaan, pengembangan model kemitraan strategis dengan lembaga lokal, pemanfaatan inovasi teknologi dalam distribusi bantuan, strategi pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi program, serta kajian tentang peran advokasi dan diplomasi kemanusiaan oleh organisasi non-pemerintah dalam konteks konflik Palestina. Melalui penelitian lanjutan di berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas bantuan kemanusiaan di wilayah konflik dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkindy, B. M. (2021). *Peran Gerakan Pramuka sebagai non-governmental organization (NGO) dalam bantuan krisis kemanusiaan Rohingya Myanmar 2017–2018*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amin, M. S., Wakil, I., Liaqat, B., & Mustafa, G. (2025). Israel-Hamas War: A Critical Analysis of Humanitarian Challenges and UN Agencies Response. *Social Sciences Spectrum*, 4(2), 647–662. <https://doi.org/10.71085/sss.04.02.300>
- BBC NEWS INDONESIA. (2021). Palestina-Israel: Bagaimana rasanya hidup di Jalur Gaza? *BBC Indonesia*.
- Dardona, Z., Amame, M., Dardona, A., & Boussaa, S. (2025). Health and environmental impacts of Gaza conflict (2023–2024): A review. *One Health Bulletin*, 5(1), 1–12. https://doi.org/10.4103/ohbl.ohbl_42_24
- Farhat, T., Ibrahim, S., Abdul-Sater, Z., & Abu-Sittah, G. (2023a). Responding to the humanitarian crisis in Gaza: Damned if you do... damned if you don't! *Annals of Global Health*, 89(1), 1–4. <https://doi.org/10.5334/aogh.3975>
- Farhat, T., Ibrahim, S., Abdul-Sater, Z., & Abu-Sittah, G. (2023b). Responding to the Humanitarian Crisis in Gaza: Damned if You do... Damned if You don't! *Annals of Global Health*, 89(1). <https://doi.org/10.5334/aogh.3975>
- Fathun, L. M. (2017). Intervensi ICRC dalam krisis kemanusiaan di Palestina tahun 2011. *Jurnal International & Diplomacy USNI*, 2(2), 247–264.
- Febi, Y., Ronika, Z., Sutanto, R., Gustarina, F., & Timur, C. (2024). Dampak konflik Hamas dan Israel tahun 2023 terhadap persepsi masyarakat Indonesia (nasionalisme, kewarganegaraan dan hak asasi manusia). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1–10.
- Hamamra, B., Abuzant, M., & Mahamid, F. (2025). The decimation of Gaza's health care system—Hospitals destroyed and lives endangered. *International Journal of Social Determinants of Health and Health Services*, 56(1), 1–5. <https://doi.org/10.1177/27551938251378096>
- Hayat, D. W. (2022). *Respon dunia internasional terhadap konflik Israel dan Palestina*. ResearchGate.
- Human Initiative. (2019). *Human Initiative laporan tahunan 2019*. Human Initiative.
- Human Initiative. (2020). *Annual report 2020: Together for humanity*. Human Initiative.
- Human Initiative. (2022). *Annual report 2022: 23 rise empower dignify*. Human Initiative.
- Human Initiative. (2023). *Annual report 2023: Ray of goodness*. Human Initiative.
- ICRC. (2024, July 5). *China: Health interventions in crisis situations*. <https://www.icrc.org/en/document/china-military-conference-health-management-crisis-situations>



- Khatima, K. (2022). *Peranan Save the Children dalam menangani masalah kesehatan mental terhadap anak dalam konflik Palestina*. Universitas Bosowa.
- Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S. (2021a). *Non-governmental organizations and development* (2nd ed.). Routledge.
- Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S. (2021b). *Non-Governmental Organizations and Development; Second edition*. www.routledge.com/series/SE0684
- Migdad, M., Al Karri, A. A., & Buheji, M. (2025). Challenges in delivering humanitarian aid during war on Gaza. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 6(2), 1329–1338. <https://doi.org/10.54660/ijmrge.2025.6.2.1329-1338>
- Nanda, A. R., & Mahwati, T. (2022). Analysis of the Palestinian and Israeli conflict in the perspective of international humanitarian law. *International Law Discourse in Southeast Asia*, 1(1), 23–42. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56873>
- Nanda, S. (2026). *Metode penelitian kualitatif: Pengertian, jenis, & contoh*. Brain Academy.
- OCHA. (2025). *Considerations for the delivery of humanitarian aid during a ceasefire in Gaza*. <https://www.unocha.org/considerations-delivery-humanitarian-aid-during-ceasefire-gaza>
- Rifki Eliandy, R., Heriadi, M., Riskinta Tumanggor, E., & Aini Hasibuan, E. (2023). Konflik Palestina dengan Israel. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 1(2), 106–112.
- Sari, A. M., & Kurmala, A. (2024). PBB peringatan 2 juta lebih warga Palestina terancam di tengah agresi. *ANTARA News*.
- Weinthal, E., & Sowers, J. (2019). Targeting infrastructure and livelihoods in the West Bank and Gaza. *International Affairs*, 95(2), 319–340. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz015>.